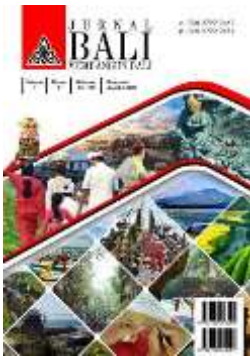




Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baktiseraga, Buleleng

Gusti Komang Rusmini¹, Nyoman Ari Surya Dharmawan², I Gusti Ayu Purnamawati³
^{1,2,3}Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
email: 1rusmini.3@student.undiksha.ac.id, 2arisuryadharmawan@undiksha.ac.id,
3ayu.purnamawati@undiksha.ac.id



Sejarah Artikel

Diterima pada
23 Juni 2026

Direvisi pada
6 Juli 2026

Disetujui pada
27 Juli 2026

Abstrak

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Baktiseraga periode 2020–2024 dalam mengelola Dana Desa serta dampaknya terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Metode penelitian: Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio keuangan desa berdasarkan data keuangan, serta wawancara sebagai data pendukung.

Hasil dan pembahasan: Efektivitas pendapatan adalah rendah. Efisiensi belanja sangat baik. Tingkat kemandirian sangat rendah. Dominasi belanja operasional, serta capaian indikator pembangunan berkelanjutan belum optimal.

Implikasi: Diperlukan strategi penguatan pendapatan asli desa dan reposisi alokasi anggaran yang lebih proporsional guna mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan jangka panjang.

Kata kunci: kinerja keuangan, dana desa, pembangunan berkelanjutan, kemandirian desa, efektivitas anggaran.

Abstract

Purpose: The objective of this study is to assess the financial performance of the Baktiseraga Village Government in managing Village Funds for the 2020–2024 period and its impact on achieving sustainable development targets.

Research methods: A descriptive quantitative method was used, with village financial ratio analysis based on financial data and interviews as supporting data.

Results and discussion: Revenue effectiveness is low. Spending efficiency is very good. The level of independence is very low. Operational expenditure dominates, and achievement of sustainable development indicators is suboptimal.

Implication: Strategies are needed to strengthen village original revenue and reposition budget allocations more proportionally to support long-term economic and environmental sustainability.

Keywords: financial performance, village funds, sustainable development, village independence, budget effectiveness.

PENDAHULUAN

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD



kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Yani, 2023). Keberadaan Dana Desa diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan (Purnamawati & Adnyani, 2020).

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas pemanfaatan Dana Desa (Julita & Abdullah, 2020). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan implementasi sistem akuntansi yang memadai berkontribusi terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah (Purnamawati & Hatane, 2020). Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat serapan anggaran dan tidak tercapainya tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan menjadi penting untuk menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan mampu direalisasikan secara efektif dan efisien (Yani *et al.*, 2025)

Salah satu desa yang secara rutin menerima Dana Desa adalah Desa Baktiseraga di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa ini dikenal sebagai desa wisata maju yang mengembangkan sektor pariwisata dan ketahanan pangan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pengelolaan keuangan yang akuntabel pada desa wisata sangat krusial karena dana desa seringkali dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes yang berisiko tinggi jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian (Sujana *et al.*, 2020). Selain aspek kehati-hatian finansial, pengelolaan aset pada desa wisata di Bali juga menuntut adanya harmonisasi antara pemerintah desa dan masyarakat adat agar tidak terjadi konflik kepentingan yang menghambat pembangunan (Purnamawati & Adnyani, 2021). Berdasarkan Laporan Realisasi APBDes Desa Baktiseraga tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi tingkat realisasi anggaran yang selengkapny tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Anggaran dan Realisasi APBDes Desa Baktiseraga Tahun 2020-2024

[Sumber: Data Laporan Keuangan Desa Baktiseraga, 2025]

Tahun	Anggaran Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Selisih	Persentase Capaian Alokasi (%)
2020	1.669.303.000,00	1.630.718.861,01	38.584.138,99	97,69%
2021	1.756.769.000,00	1.699.902.701,46	56.866.298,54	96,76%

2022	1.778.642.800,00	1.676.782.877,33	101.859.922,67	94,27%
2023	1.883.165.900,00	1.814.310.696,47	68.855.203,53	96,34%
2024	3.141.908.322,94	2.515.121.164,51	626.787.158,43	80,05%

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi APBDes Desa Baktiseraga selama tahun 2020–2024 mengalami dinamika pengelolaan anggaran yang kurang stabil. Pada tahun 2020, tingkat realisasi mencapai 97,69%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran tergolong cukup efektif. Pada tahun 2021 dan 2022, persentase capaian sedikit menurun masing-masing menjadi 96,76% dan 94,27%, dengan selisih anggaran yang mulai membesar, mengindikasikan potensi permasalahan efisiensi atau pelaksanaan program. Tahun 2023 masih mencatat tingkat realisasi yang relatif tinggi sebesar 96,34%, namun disertai dengan peningkatan selisih anggaran yang mengarah pada kecenderungan penggunaan anggaran yang kurang optimal. Fenomena paling menonjol terjadi pada tahun 2024, ketika alokasi anggaran meningkat secara signifikan hingga melebihi Rp3 miliar, tetapi tingkat serapan justru menurun menjadi 80,05% dengan selisih anggaran mencapai sekitar Rp626.787.158.

Tingginya angka sisa anggaran (SiLPA) ini bukan prestasi efisiensi, melainkan indikasi lemahnya perencanaan program atau hambatan teknis dalam eksekusi anggaran di lapangan (Sari & Melaty, 2021). Kondisi tersebut juga mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam menghadapi lonjakan anggaran yang tidak diiringi dengan kesiapan perencanaan dan kapasitas manajerial. Ketidakseimbangan antara besarnya anggaran dan tingkat realisasi dapat berdampak pada tidak optimalnya pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi dinamika dalam efektivitas dan pertumbuhan realisasi anggaran. Penelitian oleh Anggela & Japlani (2022), Anugeraheni & Yuniarta (2022) serta Supriati (2021) menemukan bahwa peningkatan alokasi dana tidak selalu diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan desa, sehingga diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi permasalahan dan potensi perbaikan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan beberapa rasio kinerja keuangan, yaitu rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, aktivitas, dan pertumbuhan, serta fokus pada Desa Baktiseraga sebagai desa wisata dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Baktiseraga guna mendukung pencapaian pembangunan desa yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng dalam pengelolaan Dana Desa selama periode 2020-2024 serta kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari Pemerintah Desa Baktiseraga melalui wawancara dengan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen laporan keuangan desa, serta sumber pendukung lainnya seperti buku dan jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (Pemerintah Pusat/Provinsi). Dalam menggunakan rasio kemandirian menurut Wulandari *et al.* (2023) terdapat rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kemudian perolehan rasio diinterpretasikan dengan rentang nilai persentase yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Rasio Kemandirian
[Sumber: Wulandari *et al.* (2023)]

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Sangat Rendah	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

b. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Dewi & Werastuti, 2024).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kemudian perolehan rasio diinterpretasikan dengan rentang nilai persentase yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Rasio Efektivitas
[Sumber: (Mahmudi, 2019)]

Kriteria Efektivitas	Efektivitas (%)
----------------------	-----------------

Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%

c. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima (Pramesti & Purnamawati, 2024). Semakin kecil rasionya, kinerja keuangan dinilai semakin baik karena terjadi penghematan anggaran (Hidayat *et al.*, 2022).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kemudian perolehan rasio diinterpretasikan dengan rentang nilai persentase yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Rasio Efisiensi
[Sumber: Wulandari *et al.* (2023)]

Kriteria Efisien	Efisien (%)
Tidak Efisien	100% ke atas
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%

d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menunjukkan bagaimana pemerintah desa memprioritaskan alokasi anggaran antara belanja operasional dan belanja modal secara optimal Wulandari *et al.* (2023)

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kemudian perolehan rasio diinterpretasikan dengan rentang nilai persentase yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Rasio Aktivitas
[Sumber: Wulandari *et al.* (2023)]

Kriteria Belanja Operasi	Belanja Operasi (%)
Baik	Dibawah 40 %
Cukup Baik	40% - 80%
Kurang Baik	80% - 100%

Tabel 6. Kriteria Rasio Aktivitas
[Sumber: Wulandari *et al.* (2023)]

Kriteria Belanja Modal	Belanja Operasi (%)
Baik	Diatas 40 %
Cukup Baik	10% - 40%
Kurang Baik	0% - 10%

e. Rasio Pertumbuhan

Pengukuran rasio pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah/desa. Untuk mengetahui rasio pertumbuhan realisasi belanja, digunakan rumus menurut Yuliani & Purnamawati (2025).

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Kemudian perolehan rasio diinterpretasikan dengan rentang nilai persentase yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kriteria Rasio Pertumbuhan
[Sumber: Susanto, 2023]

Kriteria Pertumbuhan	Tingkat Pertumbuhan (%)
Sangat Rendah	0% - 10%
Rendah	11% - 20%
Sedang	21% - 30%
Tinggi	> 40%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (Pemerintah Pusat/Provinsi). Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah. Hasil perhitungan rasio kemandirian Pemerintah Desa Baktiseraga merupakan gambaran kemampuan desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari sumber pendapatan asli desa (PADes) tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian
[Sumber: Diolah Peneliti, 2025]

Tahun	PADes	Pendapatan Transfer	Hasil (%)	Kategori
2020	Rp27.000.000	Rp1.624.303.000	1.66%	Sangat rendah
2021	Rp47.138.000	Rp1.646.631.000	2,86%	Sangat Rendah

2022	Rp60.000.000	Rp1.683.642.800	3,56%	Sangat Rendah
2023	Rp55.000.000	Rp1.803.165.900	3,05%	Sangat rendah
2024	Rp60.000.000	Rp3.056.908.322	1,96%	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Desa Baktiseraga selama periode 2020–2024 berada pada kategori sangat rendah. Nilai rasio kemandirian yang berkisar antara 1,66% hingga 3,56% menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap total pendapatan desa masih sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun daerah.

Rendahnya rasio kemandirian tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan desa dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PADes belum berjalan secara maksimal. Ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan desa dibiayai oleh dana eksternal, sehingga ruang kemandirian fiskal desa menjadi terbatas. Fluktuasi rasio kemandirian yang terjadi setiap tahun juga mencerminkan belum stabilnya pengelolaan dan pengembangan potensi pendapatan asli desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwijayanti & Diatmika (2025) yang menemukan bahwa rasio kemandirian Desa Busungbiu dikategorikan rendah sekali, yang berarti desa sangat bergantung pada dana transfer pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Baktiseraga perlu meningkatkan upaya penguatan PADes melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, optimalisasi pengelolaan aset desa, serta inovasi dalam sumber pendapatan desa agar tingkat kemandirian keuangan desa dapat meningkat dan ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi secara bertahap.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi pendapatan asli desa (PADes) dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan desa.

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas
[Sumber: Diolah Peneliti, 2025]

Tahun	Realisasi PADes	Anggaran Pendapatan	Hasil (%)	Kategori
2020	Rp33.500.000	Rp27.000.000	124%	Sangat Efektif
2021	Rp44.638.000	Rp47.138.000	95%	Efektif

2022	Rp40.613.000	Rp60.000.000	68%	Kurang Efektif
2023	Rp57.615.500	Rp55.000.000	105%	Sangat Efektif
2024	Rp60.000.000	Rp60.000.000	100%	Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pada Tabel 9, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pencapaian Pendapatan Asli Desa (PADes) selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2023, rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi PADes mampu melampaui target anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2021 dan 2024 rasio efektivitas berada pada kategori efektif, yang mengindikasikan bahwa realisasi PADes telah mencapai atau mendekati target anggaran. Namun, pada tahun 2022 rasio efektivitas berada pada kategori kurang efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi PADes belum mampu memenuhi target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan desa.

Fluktuasi rasio efektivitas tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasikan PADes belum sepenuhnya stabil dari tahun ke tahun. Tingginya rasio efektivitas pada tahun 2020 dan 2023 dapat mengindikasikan adanya penetapan target PADes yang relatif konservatif atau keberhasilan desa dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada. Sebaliknya, rendahnya rasio efektivitas pada tahun 2022 dapat disebabkan oleh penetapan target PADes yang terlalu tinggi atau belum optimalnya pengelolaan dan pemungutan sumber pendapatan desa. Kondisi ini menunjukkan meskipun secara efektivitas pencapaian target PADes tergolong baik pada sebagian besar tahun penelitian, Pemerintah Desa tetap perlu meningkatkan akurasi dalam perencanaan target pendapatan serta memperkuat strategi pengelolaan PADes agar pencapaian pendapatan desa dapat lebih konsisten dan berkelanjutan. Hal tersebut sependapat dengan penelitian dari (Nisa *et al.*, 2025) yang menyatakan bahwa efektivitas pencapaian pendapatan dinilai dari kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan target yang telah direncanakan karena semakin tinggi tingkat efektivitas maka semakin baik kemampuan desa dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki secara optimal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

[Sumber: Diolah Peneliti, 2025]

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Hasil (%)	Kategori
2020	Rp1.511.445.915	Rp1.630.718.861	93%	Kurang Efisien
2021	Rp1.482.085.552	Rp1.699.902.701	87%	Cukup Efisien
2022	Rp1.648.370.437	Rp1.676.782.877	98%	Kurang Efisien
2023	Rp1.726.771.369	Rp1.814.310.696	95%	Kurang Efisien
2024	Rp2.208.729.439	Rp2.515.121.164	88%	Cukup Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi pada Tabel 10, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dan cenderung berada pada kategori kurang efisien. Rasio efisiensi yang relatif tinggi pada tahun 2020, 2022, dan 2023 mengindikasikan bahwa realisasi belanja desa hampir menyerap seluruh pendapatan yang diperoleh, sehingga ruang untuk penghematan anggaran menjadi sangat terbatas. Kondisi ini dapat disebabkan oleh tingginya kebutuhan belanja desa, baik untuk pelaksanaan program pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, maupun kegiatan pelayanan masyarakat, yang tidak selalu diimbangi dengan peningkatan pendapatan desa secara signifikan. Hal ini tercermin dari struktur realisasi belanja desa pada tahun 2023 yang didominasi oleh Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar sekitar 51,21% dari total belanja, diikuti oleh Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 24,91%, sehingga sebagian besar pendapatan desa terserap untuk belanja rutin dan pembangunan.

Sementara itu, pada tahun 2021 dan 2024 rasio efisiensi berada pada kategori cukup efisien, yang menunjukkan adanya upaya pengendalian belanja dan perencanaan anggaran yang lebih baik. Perbaikan efisiensi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah desa mulai mampu mengalokasikan anggaran secara lebih selektif sesuai dengan prioritas kebutuhan. Namun demikian, fluktuasi rasio efisiensi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya stabil dan masih memerlukan peningkatan konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran agar pemanfaatan sumber daya keuangan desa dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai bagaimana sumber daya anggaran baik anggaran/belanja operasi maupun modal. Belanja

operasional menggambarkan komponen pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan fungsi administratif dan pelayanan dasar, sementara belanja modal menunjukkan kapasitas pemerintah dalam mendorong pembangunan fisik, peningkatan infrastruktur, dan perluasan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Adapun hasil perhitungan rasio aktivitas belanja operasi dan belanja modal tersaji pada Tabel 11 dan 12.

Tabel 11. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Operasi
[Sumber: Diolah Peneliti, 2025]

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Desa	Hasil (%)	Kategori
2020	Rp1.080.848.890	Rp1.511.445.915	71%	Kurang Baik
2021	Rp1.226.403.200	Rp1.482.085.552	83%	Kurang Baik
2022	Rp1.289.152.856	Rp1.648.370.437	78%	Cukup Baik
2023	Rp1.460.020.856	Rp1.726.771.364	85%	Kurang Baik
2024	Rp1.715.873.956	Rp2.208.729.439	78%	Cukup Baik

Rasio aktivitas belanja khususnya pada belanja operasi pada periode 2020–2024 yang tersaji pada Tabel 11 menunjukkan dominasi belanja operasional dalam struktur belanja desa. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio masing-masing tercatat sebesar 71% dan 83% serta berada pada kategori Kurang Baik, yang mengindikasikan tingginya porsi belanja operasional dibandingkan bentuk belanja yang bersifat produktif. Pada tahun 2022 terjadi penurunan rasio menjadi 78% dan masuk kategori Cukup Baik, namun situasi tersebut tidak bertahan karena pada tahun berikutnya rasio kembali meningkat menjadi 85% dengan kategori Kurang Baik. Pada tahun 2024, rasio turun kembali ke 78% dan masuk kategori Cukup Baik, menunjukkan adanya sedikit perbaikan proporsional, meskipun belum bersifat struktural.

Tabel 12. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal
[Sumber: Diolah Peneliti, 2025]

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Desa	Hasil (%)	Kategori
2020	Rp303.156.400	Rp1.511.445.915	20%	Cukup Baik
2021	Rp238.842.500	Rp1.482.085.552	16%	Cukup Baik
2022	Rp185.338.600	Rp1.648.370.437	11%	Cukup Baik
2023	Rp266.940.150	Rp1.726.771.364	15%	Cukup Baik

2024	Rp1.282.177.100	Rp2.208.729.439	58%	Baik
------	-----------------	-----------------	-----	------

Pada rasio aktivitas belanja modal Desa Baktiseraga selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan yang relatif rendah pada awal periode. Pada tahun 2020 hingga 2023, rasio belanja modal masing-masing berada pada kisaran 11%–20% dan seluruhnya masuk kategori Cukup Baik, yang mencerminkan bahwa porsi belanja investasi fisik masih terbatas dibandingkan total belanja desa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur belanja pada empat tahun pertama cenderung berorientasi pada belanja rutin dan operasional, sementara kapasitas fiskal untuk belanja pembangunan belum menjadi prioritas utama. Memasuki tahun 2024 terjadi perubahan signifikan, ditandai dengan peningkatan rasio belanja modal menjadi 58% dan berkategori Baik. Lonjakan ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas fiskal ke arah belanja yang berorientasi pada penguatan infrastruktur dan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis rasio aktivitas menunjukkan bahwa alokasi belanja masih didominasi oleh belanja operasional yang sebagian besar masuk kategori kurang baik, sedangkan belanja modal pada kategori cukup baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran desa lebih banyak terserap pada kegiatan operasional rutin dibandingkan belanja yang bersifat investasi jangka panjang. Ke depan, porsi belanja modal perlu ditingkatkan agar dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Cheryll *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa bahwa dominasi belanja operasional berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal untuk belanja modal yang dapat mendorong percepatan pembangunan daerah termasuk pembangunan desa.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui tingkat peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari tahun ke tahun sebagai indikator perkembangan kemampuan keuangan desa. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah desa mampu meningkatkan potensi pendapatan secara mandiri melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki.

Tabel 13. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan
[Sumber: Diolah Peneliti, 2025]

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Pertumbuhan	Kategori
2020	Rp1.080.848.890	-	Kurang Baik
2021	Rp1.226.403.200	74,59%	Kurang Baik

2022	Rp1.289.152.856	27,29%	Cukup Baik
2023	Rp1.460.020.856	-8,33%	Kurang Baik
2024	Rp1.715.873.956	9,09%	Cukup Baik

Berdasarkan Tabel 13, rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes) selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan kategori kinerja yang bervariasi antara kurang baik dan cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan desa dalam meningkatkan PADes dari tahun ke tahun belum stabil dan masih memerlukan penguatan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa. Fluktuasi rasio pertumbuhan PADes tersebut mencerminkan bahwa kinerja keuangan desa belum sepenuhnya berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan PADes menunjukkan tren positif yang menandakan adanya potensi peningkatan pendapatan desa melalui optimalisasi sumber PADes yang dimiliki. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh perbaikan pengelolaan aset desa, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, serta kontribusi unit usaha desa. Meskipun demikian, pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan kestabilan kinerja keuangan desa.

Penurunan tingkat pertumbuhan pada tahun 2023 menjadi indikator adanya tantangan dalam mempertahankan kinerja pendapatan desa. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan inovasi dalam menggali potensi lokal, maupun pengaruh kondisi ekonomi yang berdampak pada aktivitas ekonomi desa. Penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan PADes pada tahun-tahun sebelumnya belum bersifat berkelanjutan.

Pada tahun 2024, PADes kembali mengalami peningkatan dengan kategori cukup baik, yang mencerminkan adanya upaya pemulihan kinerja keuangan desa. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mulai melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan pendapatan. Namun demikian, pertumbuhan yang belum stabil secara konsisten menegaskan bahwa desa masih perlu meningkatkan strategi pengelolaan PADes secara berkelanjutan melalui diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan partisipasi masyarakat.

Kinerja Keuangan Desa Baktiseraga Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa meskipun Pendapatan Asli Desa (PADes) masih tergolong rendah, alokasi dana yang direalisasikan telah

menunjukkan output kegiatan yang konkret. Hal ini diperkuat dengan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Desa Baktiseraga Tahun 2025 yang tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13. Laporan Kegiatan Desa Baktiseraga Tahun 2025
[Sumber: Diolah Peneliti]

No	Kelompok Kegiatan	Contoh Kegiatan Utama	Tujuan Utama	Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan
1	Kegiatan Lingkungan	Pengelolaan sampah berbasis sumber, gotong royong pantai, pelepasan tukik, studi tiru pengelolaan sampah	Pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak sampah	Menjaga kualitas lingkungan, mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir dan darat
2	Kegiatan Kesehatan dan Sosial	Posyandu balita, ibu hamil, dan lansia; fogging DBD; kunjungan rumah; pembagian bantuan KPM	Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan kelompok rentan
3	Kegiatan Ketahanan Pangan	Urban farming, budidaya ikan nila, peternakan, musyawarah desa khusus ketahanan pangan	Pemenuhan pangan lokal dan pemanfaatan lahan	Menguatkan ekonomi lokal dan kemandirian pangan desa
4	Kegiatan Pengembangan Pariwisata	Pengelolaan Pantai Penimbangan, kerja sama perbankan, konservasi wisata laut	Peningkatan PADes dan daya tarik wisata	Mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan

Dari Tabel 11 dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Baktiseraga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan beberapa kegiatan yang inovatif, seperti pengembangan sektor pariwisata desa, pengelolaan peternakan dalam kota, serta budidaya sayuran dan ikan nila dalam rangka memperkuat ketahanan pangan lokal. Dukungan ini dapat dilihat dari penilaian kinerja keuangan Pemerintah Desa Baktiseraga selama periode tahun 2020-2024 dimana ini sejalan dengan ditetapkan Desa Baktiseraga sebagai desa wisata sehingga dianggap mampu mengembangkan potensi desa yang ada.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara kepada salah satu warga Desa Baktiseraga pada tanggal 26 September 2025.

1. Peningkatan Infrastruktur selama 5 tahun terakhir

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu warga desa Baktiseraga yang berkaitan dengan Infrastruktur selama 5 tahun terakhir yakni mengalami

peningkatan. Warga desa menyatakan bahwa, *“Nggih betul, tyang sebagai masyarakat merasakan adanya peningkatan terutama dalam perbaikan infrastruktur jalan desa, penerangan jalan, serta pengembangan fasilitas umum seperti balai desa dan tempat wisata lokal.* Peningkatan infrastruktur tersebut berdampak pada kemudahan akses masyarakat antar dusun serta menuju pusat ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, dan destinasi wisata, sehingga mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa secara lebih efektif.

2. Desa Wisata

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Baktiseraga, penetapan desa sebagai desa wisata dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Desa. Warga desa menyatakan bahwa *“Betul, saat ini lumayan banyak kreasi kreasi dari pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian desa, seperti pembudidayaan ikan nila, urban farming, wisata laut. Kalau dari sisi masyarakat pasti juga diuntungkan karena masyarakat juga memiliki lapangan pekerjaan baru dan di pantai–pantai jugaa masyarakat bisa berjualan”.* Berbagai potensi wisata yang dikembangkan, seperti wisata laut, konservasi ekosistem, urban farming, dan penangkaran penyu, menjadi daya tarik bagi wisatawan.

3. Program Ketahanan Pangan Desa

Pada program ketahanan pangan desa di Desa Baktiseraga dinilai telah membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Warga desa menyatakan bahwa *“pada awalnya hanya terdapat kegiatan urban farming di sekitar lokasi pengelolaan sampah, namun dengan dukungan pemerintah desa kegiatan tersebut berkembang melalui pengelolaan sampah organik dan anorganik, dimana sampah organik diolah menjadi kompos, sedangkan sampah plastik dikumpulkan dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Saat ini juga telah dikembangkan budidaya ikan nila di belakang kantor desa serta peternakan kambing di area pengelolaan sampah”.* Program ketahanan pangan tersebut menunjukkan integrasi antara pengelolaan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan pangan lokal, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi dan lingkungan serta meningkatkan kemandirian masyarakat desa.

4. Kontribusi Pemuda Pemudi Pada Desa Baktiseraga

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa antusias pemuda pemudi Desa Baktiseraga memegang peranan penting dalam keterlibatan untuk menciptakan inovasi dalam pengelolaan potensi lokal. Salah satu warga desa menyatakan bahwa, *“Jaman sekarang ini sudah apa apa tinggal cari di hp, saya*

sudah tidak muda lagi kurang mengerti dengan hal yang seperti itu. Inilah pentingnya mengajak pemuda pemudi untuk ikut serta dalam setiap kegiatan desa, yang lebih paham dalam penggunaan media sosial kan anak muda”.

Kontribusi pemuda pemudi tersebut berperan sebagai penggerak transformasi digital di tingkat desa dan mendukung pembangunan melalui peningkatan daya saing ekonomi lokal serta perluasan akses informasi dan promosi potensi desa.

5. Transparansi Penggunaan Dana Desa Kepada Masyarakat

Transparansi dalam penggunaan Dana Desa menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif. *“Sebagian besar masyarakat menjawab bahwa pemerintah desa cukup transparan, misalnya melalui papan informasi anggaran dan musyawarah desa terbuka. Hal ini meningkatkan kepercayaan warga terhadap pengelolaan Dana Desa”.* Penerapan prinsip transparansi tersebut mendorong peningkatan kepercayaan publik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan pembangunan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Baktiseraga periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun berorientasi positif terhadap pembangunan fisik dan pemberdayaan. Secara umum, tingkat kemandirian desa masih tergolong sangat rendah akibat tingginya ketergantungan pada dana transfer, dan rasio efisiensi cenderung kurang efisien karena besarnya proporsi belanja operasional yang menyerap sebagian besar pendapatan. Meskipun rasio efektivitas dan pertumbuhan PADes masih mengalami ketidakstabilan dari tahun ke tahun, terdapat pergeseran prioritas yang signifikan pada tahun 2024 di mana belanja modal meningkat tajam, menandakan fokus yang lebih serius pada investasi infrastruktur. Terlepas dari keterbatasan ruang fiskal tersebut, realisasi anggaran desa terbukti mampu memberikan dampak nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yang tercermin dari keberhasilan program desa wisata, inisiatif ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur, serta partisipasi aktif pemuda dan transparansi publik yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Pemerintah Desa Baktiseraga diharapkan dapat terus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengembangan sektor pariwisata agar kemandirian fiskal dapat meningkat secara bertahap. Selain itu, akurasi dalam perencanaan anggaran perlu diperbaiki untuk menjaga stabilitas efisiensi dan efektivitas,

sembari mempertahankan porsi belanja modal yang memadai guna memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa di masa mendatang. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melakukan studi komparatif antar desa wisata serta mengkaji lebih dalam peran unit usaha desa dalam mengelola potensi lokal, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

REFERENSI

- Anggela, D. A., & Japlani, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Periode (2019-2020) Pada Kantor Desa Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Manajemen Diversifikasi*, 2(2), 436–445. <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v2i2.1128>
- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015 – 2019. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 426–437.
- Cheryll, B. A., Kumenaung, A. G., & Kawung, G. M. V. (2025). Analisi Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Rasio Keserasian Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 4(25), 85–95. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/64143>
- Dewi, K. B. R., & Werastuti, D. N. S. (2024). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Melalui Pengukuran Value For Money Untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v14i3.79749>
- Dwijayanti, K. T. P., & Diatmika, I. P. G. (2025). Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan, Serta Ketergantungan Keuangan Daerah Di Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 3, 217–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/vjra.v14i3.103359>
- Hidayat, R., Hartaty, E. H., & Jannang, A. R. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Cemerlang : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(4), 70–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i4.475>
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>
- Khoirun Nisa, L., Ibrahim, M., & Bintang Balele, A. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Galesong Baru Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 7(1), 16–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.46918/point.v7i1.2664>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keempat).
- Pramesti, P. A. A., & Purnamawati, I. G. A. (2024). Penerapan Sistem Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(3), 702–712.

- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. S. (2021). Urgensi Tat Tvam Asi Dalam Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.03>
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2020). Peran Komitmen, Kompetensi, Dan Spiritualitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Purnamawati, I. G. A., & Hatane, S. E. (2020). Analysis Of Local Government Financial Information Quality Based On Internal And External Factors. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 11(2), 66. <https://doi.org/10.26740/jaj.v11n2.p66-81>
- Sari, S. P., & Melaty, K. P. (2021). Determinan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa: Studi Kabupaten Sukoharjo. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(2), 123–130. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/max>
- Sujana, E., Saputra, A. K., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal Control Systems And Good Villagen Governance To Achieve Quality Village Financial Reports. *International Journal of Innovation, Creativity And Change*, 9(12), 98–108. [Www.ijicc.Net](http://www.ijicc.net)
- Supriati, D. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Riau.
- Wulandari, R., Anggun, B., Lestari, H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/657>
- Yani, N. N. P., Purnamawati, I. G. A., & Yuniarta, G. A. (2025). Pertumbuhan Dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 6(3), 197–210. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v6i3.475>
- Yani, S. L. (2023). Alokasi Dana Desa Dalam Mendukung Kebijakan Desa Di Kabupaten Sidoarjo. *Akuntansi Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 79–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i3.670>
- Yuliani, M. R., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Di Bpkpd Kabupaten Buleleng. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 16, Issue 02). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v16i02.80502>.